

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan di zaman modern sebagaimana yang dihadapi dikehidupan saat ini sangatlah penting dan telah dimanfaatkan perkembangannya. Karena semua bidang kehidupan memanfaatkan perkembangan tersebut, mulai dari sektor terkecil hingga ke sektor-sektor besar yang digunakan untuk menunjang perekonomian suatu Negara. Sedemikian pentingnya ilmu pengetahuan tersebut, hingga Allah Swt. berfirman dalam *Q.S. Al-Mujādalah/58:11*.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجْلِسِ فَاَفْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِذَا قِيْلَ اَنْشُرُوْا فَاَنْشُرُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اٰتُوْا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, ‘Berlapang-lapanglah dalam majelis,’ maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kalian. Dan apabila dikatakan, ‘Berdirilah kamu,’ maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui atas apa yang kalian kerjakan”¹.

Firman Allah Swt di atas dengan jelas menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan memperoleh kedudukan yang tinggi. Keimanan yang dimiliki seseorang akan menjadi pendorong untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang dimiliki seseorang akan membuat dia sadar betapa kecilnya manusia di hadapan Allah Swt, sehingga akan tumbuh rasa kepada Allah Swt bila melakukan hal-hal yang dilarangnya.

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), hlm. 793.

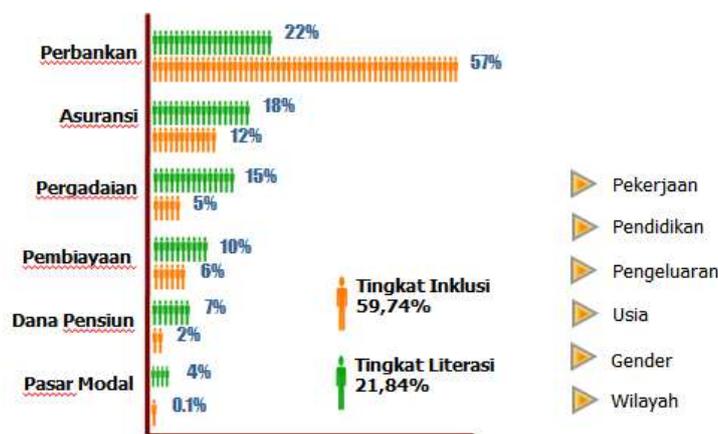
Pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung saat ini bukan semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, melainkan juga mempunyai tujuan untuk menciptakan manusia Indonesia yang berwawasan luas dan memiliki pandangan jauh ke depan. Untuk itu, pembangunan ekonomi tidak hanya dilakukan melalui pembangunan sarana fisik yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat, tetapi melalui pengembangan kemampuan berpikir manusia Indonesia. Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir masyarakat dilakukan dengan pengembangan kemampuan pengelolaan keuangan masyarakat dengan lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan program literasi keuangan yang diharapkan mampu menciptakan masyarakat Indonesia yang cerdas mengenai pengelolaan keuangan.

Literasi keuangan adalah kemampuan untuk memahami pengetahuan serta keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai kesejahteraan.² Indeks literasi keuangan merupakan parameter atau indikator yang menunjukkan tingkat pengetahuan, keterampilan dan keyakinan terkait lembaga keuangan serta produk dan jasanya. Selain itu, indeks literasi keuangan juga memberikan informasi mengenai tingkat pengetahuan masyarakat terhadap fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna produk dan jasa keuangan. Literasi keuangan diharapkan mampu mendorong peningkatan pemanfaatan produk dan jasa keuangan untuk meningkatkan edukasi dan mengembangkan produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan lapisan masyarakat.

Saat ini pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan masih rendah dan tidak merata pada setiap sektor industri jasa keuangan. Masih rendahnya pengetahuan tersebut memiliki pengaruh terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan, sebagaimana grafik berikut:

²Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Saku Regulasi Edukasi dan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*, (Jakarta: OJK, 2015), hlm. 114.

Grafik 1
Survei Nasional Literasi Keuangan 2013



Sumber: OJK Regional 9 Kalimantan

Tingkat pengenalan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan juga selaras dengan penggunaan jenis produk dan jasa keuangan. Dari berbagai jenis produk dan jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan ternyata tabungan merupakan produk keuangan yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, selaras dengan tingkat pengenalan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Produk perasuransian dengan berbagai jenisnya ternyata juga belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Padahal produk-produk perasuransian merupakan instrument keuangan yang sangat penting untuk memberikan proteksi kepada seseorang, keluarga dan/atau benda dari berbagai kemungkinan risiko di masa yang akan datang. Produk dan jasa dari lembaga pembiayaan dan pergadaian juga relatif belum terlalu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, walaupun kedua sektor jasa keuangan dimaksud sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas dan hadir di pelosok nusantara. Begitu pula halnya dengan dana pensiun, walaupun untuk memenuhi kebutuhan hidup saat memasuki masa pensiun memerlukan persiapan sejak dini, masyarakat yang menggunakan produk dan jasa dana pensiun masih sangat sedikit. Produk-produk pasar modal juga belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena masih adanya persepsi produk pasar modal

memiliki risiko yang tinggi dan relatif belum terjangkau, baik dari sisi harga maupun ketersediaannya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Dengan demikian, peluang untuk meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa pasar modal masih terbuka lebar, mengingat potensi jumlah kelas menengah juga semakin meningkat.

Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu menjadikan Literasi Keuangan menjadi program strategi yang bersifat nasional. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan OJK sesuai dengan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang memberi amanat kepada OJK untuk melakukan edukasi dan perlindungan konsumen dan masyarakat.³ Maka setiap dua tahun sekali dilakukan survei nasional untuk mengetahui tingkat literasi keuangan tersebut sebagaimana grafik berikut:

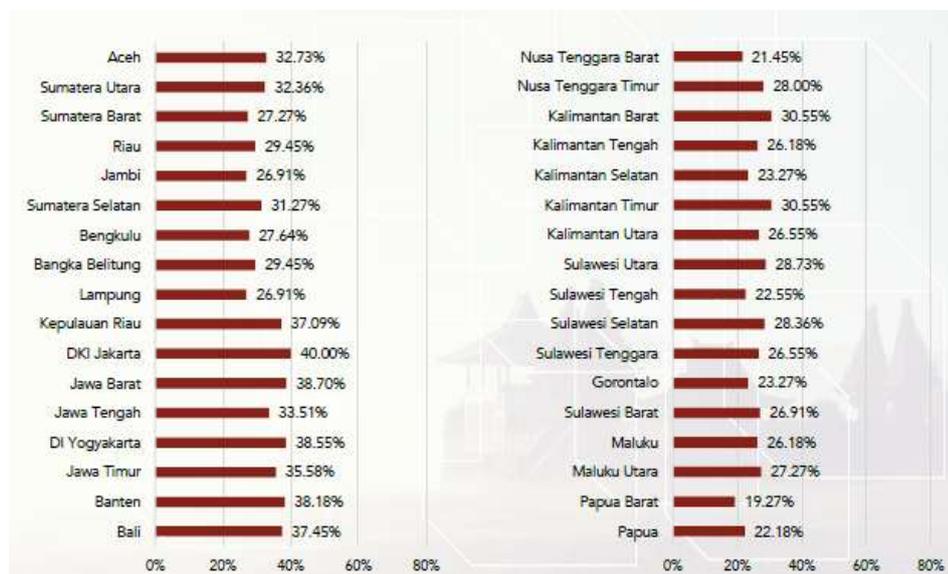
Grafik 2
Indeks Literasi Keuangan 2013-2016



Sumber: OJK Regional 9 Kalimantan

³Otoritas Jasa Keuangan, *Buku saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Ke 2* (Jakarta: OJK, 2015), hlm. 2.

Grafik 3
Indeks Literasi Keuangan Provinsi



Sumber: OJK Regional 9 Kalimantan

Berangkat dari kondisi tersebut, bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Kalimantan Selatan masih rendah. Dengan demikian, diperlukan berbagai upaya yang komprehensif dan sistematis untuk meningkatkan indeks literasi keuangan tersebut.

Selain dari survei tersebut, indeks literasi keuangan masyarakat Kalsel juga masih rendah sebagaimana pengamatan yang dilakukan oleh OJK Regional 9 Kalimantan. Hal ini terlihat ketika pengisian kuisioner yang dibagikan ketika edukasi dilakukan, bahwa masih banyak masyarakat yang belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan.⁴

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam lagi terkait bagaimana rencana dan strategi OJK Regional 9 Kalimantan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Kalsel yang hasilnya akan dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Rencana dan Strategi Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat Kalimantan Selatan”.

⁴Andika Prasetya, Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen, *Wawancara Pribadi*, OJK Regional 9 Kalimantan, 5 Nopember 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang sudah diuraikan pada latar belakang masalah, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana rencana Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana strategi Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui rencana Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui strategi Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Kalimantan Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan untuk lebih meningkatkan lagi strategi dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Kalimantan Selatan;
2. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda;

3. Bahan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sektor jasa keuangan;
4. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman yang mungkin terjadi dalam memahami penelitian ini maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Rencana adalah rancangan; rangka sesuatu yang akan dikerjakan.⁵ Rencana yang penulis maksud adalah rencana OJK Regional 9 Kalimantan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Kalimantan Selatan.
2. Strategi adalah siasat; rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.⁶ Strategi yang penulis maksud adalah strategi OJK Regional 9 Kalimantan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Kalimantan Selatan.
3. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai tugas, fungsi wewenang mengatur dan mengawasi sektor perbankan, Industri Keuangan NonBank (IKNB) dan pasar modal serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁷
Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud penulis adalah Otoritas Jasa

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 741.

⁶*Ibid*, hlm. 859.

⁷Otoritas Jasa Keuangan, *op.cit.*, hlm. 2.

Keuangan Regional 9 Kalimantan yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani KM. 5,2 Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur.

4. Literasi Keuangan adalah kemampuan untuk memahami pengetahuan serta keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai kesejahteraan.⁸ Literasi keuangan yang dimaksud penulis adalah masyarakat Kalimantan Selatan dalam hal memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan penulis, sejauh ini skripsi yang mengangkat permasalahan seperti ini belum ada, walaupun ada dari segi judul dan isinya memang berbeda. Adapun literatur yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Jenni Alviana (110116020) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Perbankan Syariah yang berjudul “Wewenang BI Pasca munculnya OJK Dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah II BI Banjarmasin)”. Perbedaan penelitian yang saya lakukan yaitu dalam penelitian ini saudara Jeni meneliti wewenang Bank Indonesia setelah munculnya OJK dalam hal pengaturan dan pengawasan bank, serta objek yang diteliti adalah Bank Indonesia berbeda dengan penelitian yang saya lakukan yaitu lebih meneliti OJK sebagai subjeknya, yang mana saya meneliti tentang bagaimana Rencana dan Strategi OJK dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Kalimantan Selatan.

⁸*Ibid*, hlm. 114.

Persamaannya adalah walaupun sama-sama membahas adanya Otoritas Jasa Keuangan namun saya lebih menitikberatkan pada OJK bukan Bank Indonesia.⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Murni Silviani (1101160220) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Perbankan Syariah yang berjudul “Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pada PT. BPRS Barkah Gemadana”. Perbedaannya yaitu masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan PT. BPRS Barkah Gemadana dan apa saja kendala yang dihadapi Otoritas Jasa Keuangan mengawasi PT. BPRS Barkah Gemadana. Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan yang mana saya tentang bagaimana rencana dan strategi OJK dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Kalimantan Selatan. Tidak ada penelitian yang saya lakukan tentang pengawasan terhadap BPRS seperti yang dilakukan saudari Murni Silviani. Sedangkan Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan namun penelitian yang saya lakukan adalah rencana dan strategi dalam hal edukasi mengenai lembaga jasa keuangan kepada masyarakat Kalimantan Selatan.¹⁰
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah (1301161592) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Perbankan Syariah yang berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan Dalam Menangani Kegiatan Investasi Di Banjarmasin” perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah pada objek penelitian yaitu saudari Nurul Hidayah meneliti tentang peran OJK dalam hal investasi terkhusus investasi-investasi yang dianggap bodong oleh OJK. sedangkan saya dalam hal edukasi mengenai lembaga jasa

⁹Jeni Alviana, “Wewenang BI Pasca Munculnya OJK dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Studi Kasus pada Kantor Wilayah II BI Banjarmasin” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari Banjarmasin, 2015).

¹⁰Murni Silviani, “Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan pada PT. BPRS Barkah Gemadana” (Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari Banjarmasin, 2015).

keuangan agar masyarakat memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas hadirnya OJK.¹¹

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi tentang latar belakang masalah dari penelitian yang akan dilakukan, kemudian akan ditarik secara eksplisit permasalahan tersebut dalam rumusan masalah, perumusan masalah ini penting karena hasilnya akan menjadi penuntun bagi langkah-langkah selanjutnya.¹² Lalu disebutkan tujuan penulisan sebagai sarana yang ingin dicapai dalam penelitian. Agar lebih jelas dan terarah dibuat juga, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori yang menguraikan teori-teori tentang OJK, rencana dan strategi serta teori tentang pengetahuan yang dijadikan penulis tolak ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam penelitian dan pedoman penganalisisan data yang penulis lakukan.

Bab III merupakan metode penelitian yang menghubungkan antara teoritis dengan penelitian lapangan, maka dibutuhkan metode penelitian yang berisi jenis, sifat, dan lokasi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi, desain penelitian merupakan reka bentuk penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, kemudian setelah itu data dianalisis dengan teknik analisis data tertentu, untuk

¹¹Nurul Hidayah, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Regional 9 Kalimantan dalam Menangani Kegiatan Investasi di Banjarmasin" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari Banjarmasin, 2017).

¹²Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, cetakan I, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 33.

mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir maka dibuatlah tahapan penelitian yang sistematis.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang berisi tentang pemaparan mengenai penyajian data dan analisis data tentang rencana dan strategi OJK Regional 9 Kalimantan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Kalimantan Selatan.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi simpulan atau hasil dari penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil dari penelitian ini.